

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Aksesibilitas layanan keuangan dengan harga terjangkau menjadi isu global, hal ini menyebabkan inklusi keuangan merupakan faktor penting dalam kegiatan perekonomian. Inklusi keuangan menjadi salah satu bagian penting bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk merencanakan kebijakan yang kuat dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam perspektif teoretis, telah diperdebatkan bahwa, inklusi keuangan merupakan kekuatan pendorong menuju pertumbuhan ekonomi. Sistem inklusi keuangan memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya memfasilitasi alokasi layanan keuangan yang efisien, baik golongan atas maupun bawah. Pentingnya sistem keuangan inklusif tersebut diakui secara luas dalam lingkaran kebijakan dan baru-baru ini inklusi keuangan telah menjadi prioritas kebijakan

Inklusi keuangan menggambarkan situasi di mana sebagian besar layanan keuangan mencapai bagian yang cukup besar dari populasi (Olaniyi dan Adeoye, 2016). Secara umum, dari berbagai definisi, inklusi keuangan adalah proses penyediaan jasa keuangan dengan biaya minimum sehingga mereka dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka tanpa ada diskriminasi dalam penggunaannya.

Konsep inklusi keuangan penting sebagai bentuk upaya negara melalui sektor multiplikasi untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan dan akses rendah ke sektor perbankan. Konsep inklusi keuangan dipopulerkan bersama dengan konsep pertumbuhan inklusif yang mencakup intervensi di sektor keuangan dalam menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Pembangunan dikatakan berhasil ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal

tersebut menyebabkan institusi keuangan memiliki peran yang besar melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan.

Perluasan akses keuangan perlu dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu negara, dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui *Gross Domestic Product* (GDP) untuk ukuran nasional. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

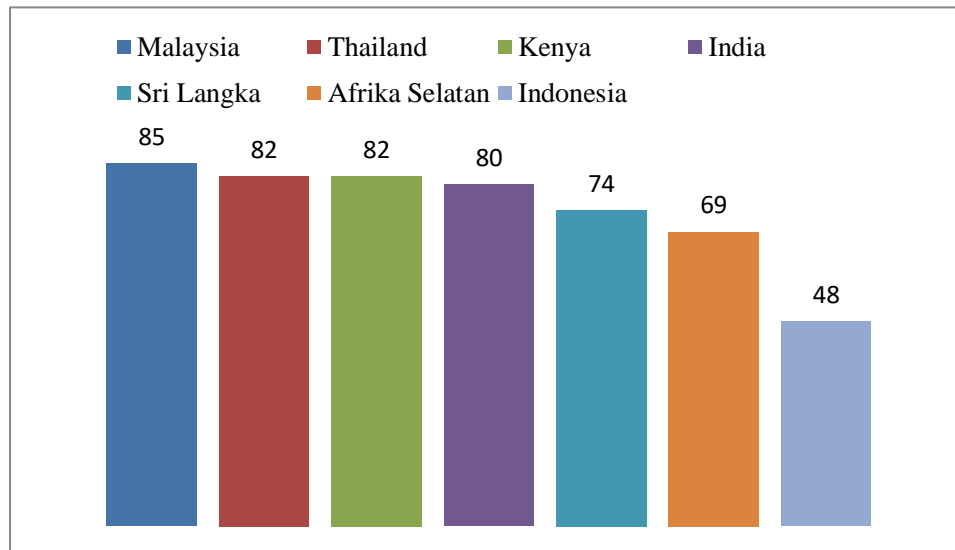
Pemerintah dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2019. Bentuk upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui sektor strategis ekonomi domestik dapat tercapai dengan meningkatkan akses masyarakat dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal.

Permasalahan utama yang terjadi yaitu akses keuangan dirasa belum cukup memadai untuk mengimbangi industri keuangan yang semakin berkembang saat ini. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan salah satu komponen penting yang melibatkan masyarakat secara luas dalam sistem perekonomian.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Mahadeva (2008), yang menjelaskan bahwa inklusi keuangan, dalam ekonomi apa pun, merupakan prasyarat untuk mencapai pertumbuhan industri dan pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan data Global Findex 2017, baru sekitar 48% dari populasi orang dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan. Jumlah ini lebih rendah daripada di negara-negara berkembang lainnya. Survei tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia hingga sampai saat ini belum

diikuti oleh akses masyarakat yang memadai kepada layanan keuangan, sehingga penduduk Indonesia yang belum memiliki akses terhadap sistem jasa keuangan diharapkan untuk memiliki akun pada layanan keuangan.



Sumber: *Global Findex*

### **Gambar 1.1 Survei Kepemilikan Akun Lembaga Keuangan Formal di Beberapa Negara Berkembang Menurut Global Index 2017**

Pendalaman inklusi keuangan di berbagai negara sedang dilakukan melalui program oleh lembaga keuangan, arahan yang dikeluarkan oleh bank sentral dan atau pernyataan visi nasional yang ditopang oleh undang-undang pemerintah. Inisiatif inklusi keuangan menerima dukungan dari pemerintah serta badan-badan internasional termasuk World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan G20. Contoh nyata bentuk dukungan diberikan oleh para pemimpin G20 yang menyatakan akan berkomitmen dan meningkatkan upaya mereka untuk memenuhi tantangan mempromosikan inklusi keuangan di seluruh dunia (GPFI, 2015).

Dalam mencapai tujuan memberikan layanan keuangan dengan cara yang mudah dan nyaman, pemerintah telah mengembangkan banyak rencana keuangan. Rencana ini bermanfaat bagi orang yang ingin mengakses layanan keuangan. Salah satu upaya guna meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dilaksanakan

dengan menerapkan salah satu rencana keuangan yang disebut Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Inklusi keuangan dalam pelaksanaannya tentu melibatkan banyak pihak. Selain institusi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, salah satu pihak yang berperan besar adalah perbankan. Banyaknya populasi penduduk di Indonesia mendorong kebutuhan akan layanan keuangan yang tinggi dalam setiap kegiatan.

Hal ini mendorong perlunya penerapan inklusi keuangan yang bertujuan untuk menyediakan layanan perbankan seperti rekening tabungan, fasilitas kredit, dan produk asuransi untuk bagian masyarakat yang lebih lemah. Sementara di sisi lain, mengacu pada tujuan untuk memastikan layanan keuangan (perbankan, asuransi, dan layanan pasar modal) dan kredit yang tepat waktu dan memadai untuk setiap bagian masyarakat serta ekonomi.

Akses ke layanan keuangan telah diakui sebagai aspek penting dari pembangunan dan lebih banyak penekanan diberikan untuk memperluas layanan keuangan ke rumah tangga berpenghasilan rendah karena masyarakat miskin kurang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami layanan keuangan yang tersedia.

Kurangnya akses keuangan membatasi jangkauan layanan dan kredit untuk rumah tangga dan usaha dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh beberapa peneliti seperti Ravikumar (2018) dalam penelitiannya dalam upaya menilai sektor perbankan dalam proses inklusi keuangan. Berbagai sudut pandang yaitu penetrasi cabang, penetrasi ATM, populasi per cabang, distribusi cabang perbankan, kredit, simpanan SCB dan bank koperasi di India. Studi ini mengungkapkan bahwa perbankan adalah kunci untuk inklusi keuangan / pertumbuhan inklusif, tetapi sebagian besar populasi yang dikeluarkan dari sistem keuangan formal juga menunjukkan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan ketidaksetaraan yang lebih tinggi.

Julie (2013) menganalisis hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Kenya dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa keduanya memiliki hubungan positif yang kuat.

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

1. Penelitian Kim et al (2019) menggunakan negara Organization of Islamic Cooperation (OIC) sebagai fokusnya, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada satu negara yaitu Indonesia.
2. Penelitian Bigirimana (2018) dan Iqbal (2018), *automated teller machine* (ATM) menjadi bagian salah satu variabel inklusi keuangan yang dipakai, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut karena data publik yang tersedia tidak memenuhi tahun observasi yang diharapkan.
3. Penelitian Iqbal (2017) memiliki hasil penelitian signifikan pada kantor cabang bank, sedangkan pada penelitian ini kantor cabang memiliki hasil yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya temuan penelitian yang berbeda satu dengan yang lain terhadap konsep yang sama.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang saya kaji guna mengkaji pengaruh dari variabel inklusi keuangan seperti kantor cabang, kartu debit, kartu kredit, dan *credit deposit ratio* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Ordinary Least Square (OLS) dan didukung oleh metode asumsi klasik. Variabel dependen yang digunakan adalah GDP sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya adalah kantor cabang, kartu debit, kartu kredit dan *credit deposit ratio*.

## **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kartu kredit, kartu debit dan *credit deposit ratio* dalam inklusi keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan kantor cabang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### **1.6 Kontribusi Riset**

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengujian empiris antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan proksi dari GDP. Tahap selanjutnya dilakukan pengujian data menggunakan metode estimasi regresi berganda dengan memasukkan variabel inklusi keuangan.

### **1.7 Uji Ketahanan (Robustness)**

Dalam sebuah penelitian seringkali poin-poin yang berpengaruh akan tetap tersembunyi, karena tidak selalu muncul dalam plot residual kuadrat terkecil yang biasa. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibutuhkan teknik statistik pendukung yaitu metode *robust*. Tujuan utama dari regresi *robust* adalah untuk memberikan hasil yang resisten di hadapan outlier.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, saya menggunakan data makro untuk meneliti pengaruh inklusi keuangan dari berbagai dimensi. Dimensi penetrasi perbankan diwakili oleh kartu kredit dan kartu debit. Dimensi ketersediaan jasa perbankan diwakili oleh jumlah kantor cabang bank. Dimensi kegunaan jasa perbankan diwakili oleh *credit deposit ratio*. Sistematis penelitian yang saya tulis meliputi beberapa bagian yaitu: Bagian 1 menjelaskan latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi riset, ringkasan hasil, ringkasan metode dan uji ketahanan. Bagian 2 memaparkan teori serta meninjau secara singkat literatur mengenai inklusi keuangan. Bagian 3 menjelaskan data dan estimasi model. Bagian 4 melaporkan hasil penelitian. Bagian 5 berisi penutup yang meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran kebijakan.